

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Konsep *Power Politics*

1. Konsep Politik

Politik pada dasarnya adalah fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya ia adalah manusia sosial yang selalu hidup dan berkembang secara dinamis. Inilah sebabnya mengapa politik selalu menjadi gejala pembangunan manusia.

Menurut H. Djawamaku (1985), karena rakyat adalah inti utama politik, pengamatan atau penelitian politik tidak bisa begitu saja meninggalkan faktor manusia dengan alasan apapun, "rakyat adalah unit dasar analisis politik empiris". (Abdulkadir, 2005).

Menurut Hornby (1974), kata "politik" dari kata "politik" (bahasa Inggris) mengacu pada sifat atau perilaku individu. Dari segi kosa kata, kata aslinya berarti: "bertindak atau menilai dengan bijak, menilai dengan tepat, dan berhati-hati." Kata ini selalu disebut "politicus" dalam bahasa Latin atau Latin, dan "politicos" dalam bahasa Yunani (Yunani), yang berarti: berhubungan dengan warga negara. Kedua kata ini berasal dari kata "polis", yang berarti kota, yaitu kota.

Menurut WJS Poerwadarminta, perkembangan kata "politik" telah memungkinkan untuk diserap ke dalam bahasa kita (bahasa Indonesia), dan memiliki 3 (tiga) arti, yaitu: "Tentang segala urusan dan tindakan/kebijakan pemerintah, strategi dll.). Satu negara menentang negara lain, penipu atau licik. Ini juga digunakan sebagai nama disiplin "Pengetahuan Ilmu Politik".

Terdapat dua kecenderungan yang ditemukan perihal “definisi politik”,
antaranya :

- a. Pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya sebuah negara, yaitu urusan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
- b. Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik (Abdulkadir, 2005).

2. Konsep *Power* (Kekuatan)

Terdapat banyak perdebatan akademis tentang bagaimana definisi spesifik dari *power* (kekuasaan) yang mengarah pada kompleksitas dan ambiguitas dari topik tersebut. Dalam membahas *power*, penting untuk diperhatikan *power* milik siapa yang dimaksud. Misalnya, Arendt (1970) mendefinisikan *power* bukan sebagai milik seorang individu, melainkan berpendapat bahwa itu milik suatu kelompok dan tetap ada hanya selama kelompok itu tetap bersama.

Sementara itu, Dahl (1957) mengusulkan untuk menyebut objek-objek yang berhubungan dengan *Power* sebagai aktor. Istilah aktor bersifat inklusif (mengikutsertakan) dan dapat merujuk pada individu, kelompok, peran, kantor, pemerintah, negara-bangsa, atau kumpulan manusia lainnya.

Salah satu definisi *power* yang paling berpengaruh dalam bidang ilmu sosial adalah Max Weber (1947) yang mendefinisikan *power* sebagai kemungkinan seorang aktor dalam suatu hubungan sosial berada dalam posisi untuk melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan. Menurut Weber, *power* adalah permainan *zero-sum* (suatu situasi di mana keuntungan yang

dimenangkan oleh salah satu pihak atas kekalahan pihak lain). dan merupakan atribut yang berasal dari kualitas, sumber daya, dan kemampuan satu subjek ataupun seseorang (Aigerim, 2015).

3. *Power* dalam Politik

Menurut Aigerim mengutip dari Joseph Nye (1990) kekuatan (*power*) adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain demi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Aigerim, 2015), pengertian tersebut sejalan dengan konsep dari politik yaitu teknik, taktik atau muslihat yang digunakan untuk mencapai cita-cita politik yang diinginkan. Selanjutnya, Nye menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk murni dari sebuah kekuatan (*Power*), yaitu *Hard Power* dan *Soft Power*

4. *Hard Power* dan *Soft Power*

a. *Hard Power*

Hard Power adalah bentuk kekuatan tertua, dimana fokusnya adalah penggunaan *Power politics* (politik kekuatan). *Hard power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan seseorang melalui tindakan paksaan atau ancaman.

Komponen dari *hard power* sangat mudah dan sederhana diidentifikasi. Secara historis, *hard power* telah diukur dengan kriteria seperti ukuran populasi (*population*), wilayah atau geografi (*geography/territory*), sumber daya alam, kekuatan militer (*military*), dan kekuatan ekonomi (*economic strength*).

b. *Soft Power*

Berbeda dengan *hard power*, Komponen dari *soft power* lebih kompleks untuk ditentukan. Menurut Nye (2008) suatu negara utamanya akan bertumpu pada tiga komponen daya: budaya (*culture*), nilai politik (*political values*), dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*).

Dalam mengevaluasi komponen dari *soft power* yang dikemukakan sebelumnya, Jonathan McClory (2011), memperluas komponen dari *soft power* milik Nye dan mengelompokkannya menjadi 5 kategori, pemerintah (*government*), budaya (*culture*), diplomasi (*diplomacy*), pendidikan (*education*), dan bisnis sekaligus inovasi (*business/innovation*) (Aigerim, 2015).

B. Konsep Kolonialisme

1. Pengertian Kolonialisme

Kolonialisme adalah konsep pendelegasian kekuasaan politik di luar wilayah hukum untuk memberdayakan daerah lain. Tentu saja hak dan kekuasaan serta kewajibannya sepenuhnya dikuasai oleh negara asalnya sebagai pusat pemerintahan. Secara administratif, wilayah baru menjadi negara bawahan dari sistem terpusat, bertanggung jawab langsung kepada Nagara.

Kolonialisme adalah pembentukan koloni di luar batas wilayah hukum, terlepas dari apakah lokasi baru tersebut sudah berpenghuni. Padahal, dengan berdirinya daerah jajahan di sana, sebuah kerajaan melakukan praktik pemekaran wilayah (*imperialisasi*). (Miftakhuddin, 2019). Kolonialisme secara umumnya diketahui sebagai paham tentang penguasaan oleh suatu

negara/bangsa terhadap daerah/wilayah milik orang lain dengan maksud memperluas wilayah pelaku kolonialisme itu sendiri.

2. Perbedaan konsep Kolonialisme dan Imperialisme

Bagai dua sisi mata koin, kolonialisme dan imperialisme tak bisa dipisah. Sebab di mana praktik kolonialisme berlangsung, di situ juga terjadi imperialisme. Pun juga sebaliknya. Kolonialisme adalah kaki-kaki bagi imperialisme. Segala bentuk kolonialisme akan berpuncak pada imperialisme. Dalam praktik, keduanya acap kali diselenggarakan dengan cara yang hampir sama, dan keduanya juga merupakan bentuk “perpanjangan tangan” dari pemerintah pusat. Hanya saja, masa di mana pertama kali imperialisme dilakukan, belum ditemukan istilah yang sesuai untuk menggambarkan proses imperialisasi itu sendiri.

Penggambaran imperialisme merujuk pada Britania karena pada masa itu Imperium Britania telah menguasai wilayah Asia dan Afrika, atau hampir tiga perempat dunia. Sekitar tahun 1830-an, penulis Inggris memperkenalkan istilah “*imperialisme*” di Prancis pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Istilah itu digunakan untuk menjelaskan secara gamblang dasar-dasar perluasan wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh Britania Raya (imperium Britania).

Secara prinsip, perbedaan keduanya terletak pada tujuannya, meski pada akhirnya, keduanya dimanifestasikan dalam bentuk penjajahan yang terkesan mengandung obsesi ekonomi. Saat Britania memperluas imperiumnya, mereka memandang penjajahan sebagai pembangunan masyarakat untuk kebaikan dunia, sebab daerah jajahan dinilai masih terbelakang. Oleh sebab itu, kini

imperialisme dimengerti dengan merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi-politik negara kaya dan berkuasa (imperialis), mengawal dan menguasai negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin disertai eksploitasi sumber-sumbernya untuk sekaligus menambah kekayaan dan kekuasaan negara imperialis.

Sekiranya dapat diketengahkan, prinsip kolonialisme adalah pendelegasian kekuatan sosio-politik, sedang imperialisme berprinsip pada hubungan ekonomi-politik (perluasan wilayah, tapi bukan koloni). Imperialisme lebih menonjolkan sifat-sifat superioritas atau keunggulan negara imperialis terhadap negara jajahan. Selain bertujuan menambah pemasukan di sektor ekonomi, kepercayaan bahwa pihak imperialis adalah bangsa yang lebih mulia (*ethnocentrism*) juga menyebabkan imperialisme dimaksudkan membangun masyarakat jajahan (Miftakhudin, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan kolonialisme dan imperialisme adalah terlihat dari bagaimana para pelaku mempraktekannya dilapangan, apabila imperialisme jika sudah mendapatkan wilayah jajahan, maka tidak hanya akan dijajah saja tetapi juga dimajukan dan dikembangkan masyarakat yang terjajah tersebut, hali ini bisa dilihat dari imperialisme kerajaan inggris (britania) yang punya banyak negara sepemakmuran didunia hasil dari imperialisme merka pada masa lalu. Sedangkan kolonialisme, lebih ke menjajah saja belum jelas apakah wilayah yang dijajah tersebut akan dimajukan masyarakatnya atau tidak.

3. Masa Kolonialisme

a. Fase kolonialisme Barat

Permulaan masa kolonialisme, dimulai ketika bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke wilayah lain hingga akhirnya membentuk koloni-koloni yang mendiami wilayah baru tersebut. Gelombang besar kolonialisme diawali ketika Columbus menemukan benua Amerika dan memberikan jalan bagi Spanyol dan Eropa lainnya untuk menjajah orang Indian (orang asli Amerika) (Miftakhuddin, 2019).

Tabel 2.1 Fase Koloni dan Imperial Negara Barat

Fase	Durasi	Tujuan	Fokus Wilayah
1	1415-1775	Ekspansi	Amerika
2	1775-1825	Penurunan Aktifitas Koloni	Amerika
3	1825-1914	Ekspansi	Afrika, Asia, dan Pasifik
4	1914-1940	Koloni Barat Melemah	Timur Tengah
5	1940-1980	Penurunan Aktifitas Koloni	Afrika, Asia, dan Pasifik

Sumber : Thomas, 2007

Pada fase pertama 1415-1775, ekspansi samudera Eropa menyebabkan kepemilikan sebagian besar Amerika (dan klaim ke seluruh belahan bumi) melalui penaklukan dan kolonisasi, serta pembentukan daerah kantong pantai (*coastal enclaves*) dan pemukiman pos perdagangan di pantai Barat dan Afrika Timur, Arab, India, Cina, Kepulauan Rempah-Rempah, dan Jepang. Kolonialisme Barat pada abad-abad ini, bagaimanapun, sebagian besar merupakan upaya menaklukan lautan Atlantik. Di Timur, para

pedagang dan misionaris Eropa mengintegrasikan diri mereka ke dalam ekonomi yang lebih besar dan lebih kaya di Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.

Fase kedua (1775-1825), Masyarakat pemukim Eropa di Amerika selama periode lima puluh tahun dari tahun 1775 hingga 1825, sebagai bagian dari Zaman Revolusi Atlantik (*age of atlantic revolution*) yang lebih luas, mereka (pemukim Eropa di Amerika) memberontak melawan pemerintahan kekaisaran dan mendirikan negara-bangsa independen di Amerika Serikat, bekas koloni Amerika – Spanyol dan Portugis – Brazil. Keturunan penjajah Eropa bukan satu-satunya pemberontak revolusioner dalam fase kedua ini, masa kontraksi kekaisaran. Penduduk asli Amerika, Mestizos, Mulattos, dan budak Afrika juga memberontak selama periode ini. Di pulau gula Prancis Saint Domingue di Karibia, pemberontakan budak pada tahun 1790-an mengalahkan tentara Eropa dan mendirikan republik hitam Haiti pada tahun 1804 (Thomas, 2007).

Fase ketiga (1825-1914), fase ini sering disebut zaman “imperialisme modern”, periode baru ekspansi Eropa dimulai di Afrika, Asia, dan Pasifik. Disana, orang Eropa telah lama mendirikan perdagangan "pabrik" dan kastil di pantai Afrika dan Asia tetapi pada abad kesembilan belas mereka menggunakan kantong-kantong ini sebagai basis untuk pindah ke pedalaman benua besar ini dan merebut kendali politik. Selama fase ekspansi ini, perbedaan kekuatan kekuasaan antara orang Eropa dan non-Eropa tumbuh sebagai akibat dari Revolusi Industri, yang memberi

kekaisaran Eropa kapal uap dan kapal perang, senapan berulang dan senapan mesin, rel kereta api, obat-obatan tropis baru, serta daya tarik dan barang produksi yang menggoda.

Antara tahun 1824 dan 1870 kerajaan Eropa menaklukan sekitar lima juta mil persegi wilayah baru di Afrika, India, Australia dan Selandia Baru, dan Asia Tenggara. Antara 1878 dan 1913 orang Eropa memperoleh tambahan wilayah delapan juta mil persegi, atau kira-kira seperenam dari permukaan tanah dunia.

Fase keempat (1914-1940), Selama fase keempat, Perang Dunia I (1914–1918) dan Depresi Hebat tahun 1930-an melemahkan Eropa Barat dan kekuasaan serta legitimasi kolonial Eropa. Perang Dunia menandai berakhirnya kolonialisme luar negeri Jerman dan memulai proses di dalam Kerajaan Inggris untuk mengalihkan kekuasaan ke koloni-koloni pemukiman di Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Peperangan juga di sisi lain, telah menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah, yang memungkinkan Inggris dan Prancis, di bawah sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa, untuk pindah ke Suriah, Lebanon, Palestina, Trans-Yordania, dan Irak (Thomas, 2007).

Periode keseimbangan yang tidak stabil ini memperlihatkan erosi kekuatan kolonial Eropa dan kepercayaan diri serta beberapa ekspansi kekaisaran baru. Pada tahun 1939 imperium-imperium Eropa telah mencapai puncak kendali teritorial dan politik mereka. Selama akhir abad kesembilan belas dan empat dekade pertama abad kedua puluh kebangkitan

gerakan nasionalis populer di kolonial India, Mesir, Indonesia, Vietnam, dan di koloni Eropa lainnya mempersiapkan jalan untuk dekolonisasi setelah Perang Dunia II. Kolonialisme Eropa juga terancam oleh munculnya saingan kuat seperti Kekaisaran Jepang, Nazi Jerman, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang berusaha menciptakan tatanan internasional baru.

Fase kelima (1940-1980), Perang Dunia II (1939–1945) menandai fase terakhir kolonialisme Barat. Perang secara dramatis menyerang kekuatan utama kekaisaran Eropa, Prancis, Belanda dan Inggris Raya, di dalam dan luar negeri. Sebagian besar Prancis dan seluruh Belanda diduduki oleh Jerman Hitler pada tahun 1940, sementara kota-kota Inggris dibom dan sumber daya keuangannya yang dulunya bisa dibentuk menjadi kering. Tentara Jerman di luar negeri mengancam Mesir dan tentara Jepang merebut Indochina Prancis, Indonesia Belanda, dan Inggris Singapura dan Malaya (serta koloni Amerika di Filipina).

Banyak wilayah yang terjajah bertekad untuk mencapai kemerdekaan dengan negosiasi damai atau, jika perlu, dengan cara kekerasan. Dengan demikian, antara tahun 1940 dan 1980 lebih dari delapan puluh koloni mencapai kemerdekaan mereka dan diakui sebagai negara-bangsa yang berdaulat (Thomas, 2007).

b. Kolonialisme Jepang

Pada pertengahan abad ke-19 sejumlah pemimpin Jepang telah mendukung penerapan teknologi Barat guna memperkuat militer Jepang. Negara ini mengejar proses modernisasi dan reformasi instan setelah

restorasi Meiji pada 1868. Teknik-teknik pembangunan kapal mulai diperkenalkan, begitu pula dengan sistem pertambangan, perkeretaapian, manufaktur persenjataan, tekstil, kaca, bahan kimia beserta aktivitas modern lainnya.

Busana dan arsitektur gaya barat adalah bagian dari proses reformasi dan pembaharuan pada awal abad ke-20. Hal ini mengusung Jepang menjadi kekuatan dunia. Transformasi membuat Jepang mulai melirik beberapa Kawasan di lingkaran kekuasaannya seperti Korea, Manchuria dan wilayah Cina lainnya.

Berdasarkan Manchukuo (1932), awal abad ke-20 merupakan potensi besar bagi Jepang untuk mendapatkan sumber daya alam dan membangun pasar konsumen di Asia Tenggara yang menarik perhatian pemerintah, militer, industri, dan kepentingan bisnis Jepang. Tidak lama setelah pendudukan Jepang atas Taiwan (1895), Kekalahan telak Rusia (1904-1905), invasi Cina (1931) dan pembentukan negara boneka Manzhouguo, militer Jepang memandang Asia Tenggara sebagai wilayah potensial untuk menancapkan pengaruh kekaisaran Jepang (Riklefs et al, 2013).

c. Thailand pada awal dan akhir masa Kolonialisme

Supaya lebih jelas batas waktu permulaan kolonialisme, maka akan dipaparkan seperti apakah kondisi negara Thailand pada masa awal dan akhir masa kolonialisme, yaitu:

1) Thailand pada masa awal kolonialisme

Pada tahun 1415 ketika permulaan kolonialisme oleh bangsa barat, negara Thailand masih dalam bentuk kerajaan yang bernama Ayutthaya yang diperintah oleh Raja Somdet Phra Intharacha I yang mendapat tawaran naik tahta oleh ayahnya raja Borommarachathirat I. Pada tahun 1511, ketika Portugis menaklukkan kerajaan Melaka di Semenanjung Melaka (*malay peninsula*) mereka juga tercatat melakukan kontak pada kerajaan Ayutthaya pada masa pemerintahan Raja Ramathibodi II, Perwakilan Portugis tersebut sangat diterima oleh sang raja dan diizinkan memasuki kerajaan. Peristiwa itu juga menandai terbukanya hubungan kerajaan Ayutthaya dengan negara barat, tidak hanya Portugis tetapi juga Inggris dan Perancis yang menyusul pada dekade – dekade berikutnya (Ellen, 2011).

Pada masa itu juga kerajaan Ayutthaya juga mengalami konflik dengan kerajaan tetangga, yaitu Burmese (sekarang Myanmar), konflik tersebut juga berlangsung sangat lama sehingga terhitung bahwa kerajaan Ayutthaya pernah mengalami kekalahan hampir sebanyak dua kali dalam peperangan antara keduanya, meskipun akhirnya tetap bisa kembali dari keterpurukan.

2) Thailand pada akhir masa kolonialisme

Pada tahun 1945 pasca perang dunia kedua, negara Thailand mendapati keadaan yang sulit dikarenakan mendukung kelompok Jepang yang kalah perang yang disebabkan oleh kepemimpinan Luang Phibun Songkram (1938 – 1944) yang menyetujui kerjasama keduanya,

hal inilah penyebab dari sulitnya hubungan Thailand dengan kelompok Amerika dan sekutu. Akan tetapi Penguasa berikutnya yaitu Sarit berhasil membuat kerja sama kembali dengan Amerika dan membawa kemajuan pada negara Thailand (Ellen, 2011).

Pada tahun-tahun berikutnya (dari 1940 sampai tahun 1980-an) ketika Long Phibun Songkram diktator yang naik tahta dari pemberontakan dan juga ikut memihak Jepang sampai Jepang di bom atom (6 dan 9 Agustus 1945) sehingga Long Phibun ikut diturunkan pada tahun 1938 sampai 1944. Selanjutnya Long Phibun digantikan oleh kediktatoran Sart Tharanat dari 1958 sampai 1963 dan dilanjutkan Kriangsak Chamanan dari 1977 sampai 1980, bersamaan dengan menurunnya aktifitas koloni dari negara barat, hal itu ditandai dengan banyaknya negara-negara terjajah yang ingin memperoleh kemerdekaan, baik itu dengan cara damai maupun dengan cara kekerasan. Negara Thailand akhirnya muncul sebagai negara yang tercatat tidak pernah dijajah, Rakyat Thai masa kini dengan bangga menunjukan sebagai satu-satunya wilayah yang tidak pernah dijajah (Riklefs et al, 2013).

4. Faktor Pendorong Kolonialisme

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keinginan kolonialisme negara barat seperti, Merkantilisme, Kapitalisme, Revolusi Industri, Jatuhnya Konstantinopel, Dorongan 3G, Teori Heliosentris :

- a. *Merkantilisme*, yakni kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, tujuannya adalah untuk mengolah kekayaan sebanyak-banyaknya (dalam bentuk emas) sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, muncul semangat beberapa negara Eropa untuk mencari koloni. Sebagai contoh, beberapa negara merkantilis di Eropa; Perancis, Inggris, Jerman, Belanda. (Aman, 2013).
- b. *Kapitalisme*, merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa dalam perekonomian, untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai modal sebesar-besarnya. Pemilikan modal yang besar dengan sendirinya akan menguasai berbagai sektor produksi, bahan baku, dan pemasaran. Menurut kapitalisme seseorang bebas memupuk kekayaannya.
- c. *Revolusi industri* adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikejakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya.
- d. *Jatuhnya Konstantinopel*, oleh Kekaisaran Turki Usmani tahun 1453. Penguasa Turki Islam dari dinasti Utsmani berhasil merebut

Konstantinopel (Istambul) pada tahun 1453. Pada saat itu Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Hal inilah yang mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasil rempah-rempah (Asia).

- e. *Dorongan Semangat Tiga G*, Kedatangan negara-negara Barat juga didorong oleh semangat 3G. 3G adalah motto dari emas (gold), Injil (*gospel* / agama) dan kemuliaan (*adventure and glory*). Emas terkait dengan pencarian kekayaan, Injil adalah pemberitaan agama Kristen, dan kemuliaan adalah tekad untuk mewujudkan kemuliaan negara-negara Barat. Ketiga slogan ini telah mendorong negara-negara Barat ke dunia Timur. (Aman, 2013).
- f. *Tantangan teori Heliosentris*, Pada tahun 1543, ilmuwan Polandia Nicolaus Copernicus mengajukan teori heliosentris. Menurut teori heliosentris, pusat tata surya adalah matahari. Bumi itu bulat seperti bola. Teori ini bertentangan dengan teori geosentris yang meyakini bahwa pusat tata surya adalah bumi. Ilmuwan Italia Galileo adalah salah satu pendukung semangat pelayaran karena ia menemukan teropong (teleskop) yang dapat melihat benda-benda jauh. (Aman, 2013).